

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Desa merupakan salah satu lembaga pemerintah penyelenggara pelayanan publik yang berinteraksi langsung dengan masyarakat sebagai penerima pelayanan publik. Adanya sistem pembangunan model *bottom-up* di Indonesia diidentifikasi berdasarkan terciptanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan perundang-undangan tentang Desa memberikan wewenang kepada wilayah tersebut untuk lebih diakui dan dilindungi oleh payung hukum, sehingga eksistensinya terjamin. Selain itu, Desa juga dapat menjadi pusat utama pemerintahan.

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam rangka membantu meningkatkan peran Pemerintah Desa berkewajiban untuk mengembangkan SID (Sistem Informasi Desa). Kewajiban Pemerintah Daerah yaitu melaksanakan optimalisasi sistem informasi desa dan wajib memberikan informasi mengenai rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh Kabupaten atau Kota kepada Pemerintah Desa. Pada Undang-Undang tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintah Desa hanya dapat mengelola SID itu sendiri. Pada Undang-Undang Desa juga menerangkan bahwa SID merupakan berbagai fasilitas penunjang SID seperti sumber daya manusia, jaringan internet, perangkat lunak dan perangkat keras. Dijelaskan secara rinci bahwa SID merupakan informasi yang berhubungan dengan pembangunan desa dan kawasan, serta meliputi data desa dan data pembangunan.

Teknologi di bidang elektronik dan komunikasi merupakan salah satu di antara berbagai aspek kehidupan yang sudah mengalami perkembangan pesat. Dengan adanya perkembangan teknologi dan komunikasi hingga saat ini dapat mempermudah manusia untuk berkomunikasi antara satu dengan lainnya. Teknologi elektronik dan komunikasi canggih yang ada saat ini berakibat pada akses dan arus informasi yang ada menjadi semakin cepat terutama berkaitan dengan adanya jaringan internet. Hasil dari adanya perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan informasi salah satunya adalah internet yang menjadi bagian esensial bagi masyarakat untuk salah satu sarana yang dapat menyebarkan dan mendapatkan informasi dengan cepat.

Sistem Informasi Desa (SID) merupakan program yang bertujuan untuk menghidupkan kembali kehidupan desa dengan melengkapi kekurangan tampilan atau profil desa yang kurang detail untuk mencerminkan keunikan informasi desa. SID bertujuan untuk mendorong pelaksanaan proses pendataan secara terbuka dan dengan partisipasi masyarakat, mendorong manajemen publik yang efektif dan pengendalian pembangunan desa melalui pengoptimalan teknologi dan sistem informasi berbasis masyarakat.

Indonesia adalah suatu negara yang terdapat beragam badan pemerintah yang tetap memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sebagai sarana untuk memperbaiki transparansi informasi publik. Pengaruh dari kemajuan teknologi informasi terhadap birokrasi pemerintah mengakibatkan diberlakukannya Pasal 2 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengamanatkan bahwa:

Pasal 2

- (1) Dalam hal permintaan informasi publik oleh Pemohon Informasi Publik, Badan Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakannya yang diambil untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik.
- (2) Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPID atas persetujuan pimpinan Badan Publik yang bersangkutan.
- (3) Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh setiap Pemohon Informasi Publik.

Berdasarkan isi pasal tersebut menunjukkan bahwa aparatur publik atau lembaga pemerintah diwajibkan untuk memberi informasi berkaitan dengan kebijakan yang telah ditentukan serta dapat lebih menekankan transparansi kepada masyarakat. Dalam hal ini pemerintah berupaya untuk mewujudkan keterbukaan informasi dengan cara pembuatan website yang berisi berbagai informasi dan dikelola oleh badan publik untuk dapat diakses oleh masyarakat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 86 tentang Desa pemerintah mengatur tentang hak dan kewajiban desa yang berkaitan dengan akses informasi. Mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka setiap instansi pemerintah yang merupakan bagian dari badan publik di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia wajib untuk dapat memberi informasi yang akurat secara transparan kepada seluruh masyarakat Indonesia (Setligt, A. O. 2017). Berdasarkan kewajiban yang harus dijalankan oleh para instansi publik berdasarkan tertinggi sampai yang terbawah, maka diperlukan cara-cara yang efektif dan strategis agar dapat menciptakan dan memberikan informasi yang layak dan akurat untuk masyarakat. Pemerintah mewajibkan desa untuk memberikan informasi yang relevana dengan kebijakan yang telah dibuat dan diambil secara transparan kepada masyarakat melalui media website yang dikelola.

Peran teknologi informasi akan terus berkembang dalam pemerintahan publik, di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Teknologi sangat dibutuhkan di instansi pemerintah untuk membantu masyarakat mengakses layanan publik dengan lebih mudah dan cepat, serta membuat informasi transparan kepada publik. Hal ini dimulai dari lingkup terkecil yaitu desa sebagaimana tertuang dalam UU Desa No. 6 Tahun 2014 Pasal 86(1) yang berbunyi: “Desa berhak mengakses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.” Peraturan Gubernur No. 47 Tahun 2016, Bab IV, Pasal 4, menjelaskan bahwa kebijakan dan strategi pengelolaan data desa merupakan suatu sistem informasi dan data desa, sebagai data yang terintegrasi dari berbagai sumber data melalui perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pemberdayaan masyarakat, pengelolaan administrasi kependudukan dan catatan sipil, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang pada tahun 2016 sampai 2021 BAB VII Kebijakan Umum dan Pembangunan Daerah, khususnya pembangunan Pusat Pengembangan Informatika Desa yang merupakan salah satu program prioritas strategis.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 maka perlu adanya upaya-upaya nyata dari pihak pemerintah Kabupaten Pemalang. Adapun implementasi dari Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang yaitu dengan membuat program inovasi sistem informasi desa melalui SIDEKEM (Sistem Informasi Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan) yang diatur dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 89 Tahun 2017 tentang “Penerapan Sistem Informasi Desa dan Pembangunan

Kawasan Perdesaan “SIDEKEM” di Kabupaten Pemalang”. Sistem Informasi Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disingkat SIDEKEM adalah salah satu wadah teknologi informasi komunikasi untuk mendukung pengelolaan sumber daya di tingkat daerah dan desa yang bersifat bebas dan terbuka di Kabupaten Pemalang. SIDEKEM menjadi wadah yang menyediakan informasi data desa seperti data kependudukan yang salah satu aspek pentingnya adalah keakuratan dan kecepatan dalam pelayanan untuk masyarakat desa. Pengembangan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi ini dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Pemalang bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan publik terhadap masyarakat Kabupaten Pemalang dengan proses yang lebih efektif dan efisien.

Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui DINPERMASDES (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) berinisiatif untuk mewadahi para relawan yang disebut dengan PUSPINDES (Pusat Pengembangan Informatika Desa) untuk bekerja sama dalam menciptakan SIDEKEM. Gagasan DINPERMADES mengenai kolaborasi SIDEKEM tersebut mendapatkan tanggapan positif dari Bupati Kabupaten Pemalang, hal ini dapat dilihat dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021. Relawan TIK tersebut merupakan suatu organisasi sosial kemasyarakatan yang kegiatannya berupaya untuk melakukan pengembangan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk anggota dan para masyarakatnya. Tugas DINPERMADES dalam memajukan program SIDEKEM ini yaitu merancang regulasi, merancang anggaran dan memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada para relawan maupun calon relawan. Selain itu,

DINPERMASDES juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberlangsungan kegiatan yang dijalankan oleh relawan TIK di Kabupaten Pematang Jaya.

Peraturan Bupati Pematang Jaya No. 89 Tahun 2017 pasal 18 tentang Penerapan Sistem Informasi dan Kawasan Pengembangan Kawasan Perdesaan “SIDEKEM” di Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya menjelaskan bahwa pemerintah desa dalam implementasi program SIDEKEM wajib mengelola dan mendistribusikan SIDEKEM sesuai dengan ketentuan hukum. Untuk itu, luaran program SIDEKEM mencakup kemampuan perangkat desa untuk menyediakan dan memelihara perangkat pendukung SIDEKEM, menyiapkan dan memberikan informasi dengan teratur serta dapat tersedia sesuai tingkat keakuratan yang tinggi tepat sekali dalam satu tahun, antara lain: Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes); Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDDes; Laporan Pengelolaan Desa (LPPDes) dan Laporan Informasi Pertanggungjawaban (LKPI). Aparat desa juga harus meningkatkan kapasitas pengelola SIDEKEM, serta meningkatkan kualitas pengelolaan SIDEKEM.

Program SIDEKEM telah disosialisasikan ke 211 desa yang terdapat di Kabupaten Pematang Jaya. Seluruh desa di Kabupaten Pematang Jaya diwajibkan untuk menerapkan Sistem Informasi Desa melalui SIDEKEM. Data dari PUSPINDES Kabupaten Pematang Jaya memperlihatkan bahwa belum semua desa di Kabupaten Pematang Jaya yang seluruhnya berjumlah 211 desa telah mengimplementasikan Sistem Informasi Desa secara online.

Tabel 1. 1

Data Perangkat Desa yang Mengakses Website SIDEKEM

| Tahun | Persentase Desa yang Mengakses |
|--------------|---------------------------------------|
| 2019 | 0% |
| 2020 | 54,40% |
| 2021 | 39,27% |
| 2022 | 39,35% |

Sumber : Kantor PUSPINDES Kabupaten Pematang

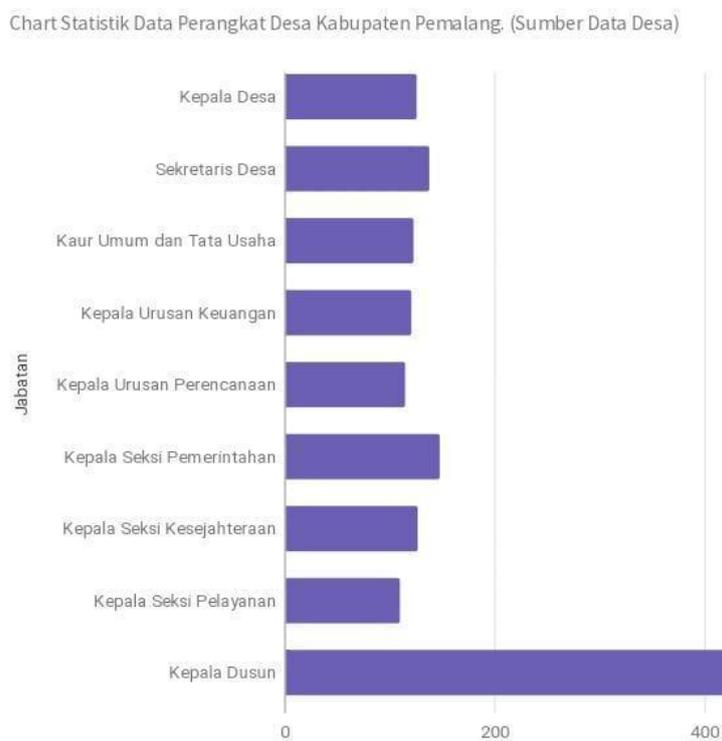
Berdasarkan tabel 1.1 maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 persentase terbesar yang mengakses website SIDEKEM hanya 0% karena terdapat perbaikan sistem. Pada tahun 2020 persentase terbesar yang mengakses website SIDEKEM mencapai 54,40%, kemudian pada tahun 2021 terdapat penurunan menjadi 39,27%, dan pada tahun 2022 terdapat sedikit kenaikan menjadi 39,35%. Pemerintah Desa Di Kabupaten Pematang dalam implementasi program SIDEKEM diwajibkan untuk mengelola dan menyebarluaskan SIDEKEM dengan menyediakan dan mendistribusikan informasi secara berkala, tersedia setiap saat serta akurat. Dapat dilihat bahwa pada Perangkat Desa yang seharusnya mengakses website SIDEKEM belum memenuhi target 100%.

Pengelolaan dan penyebarluasan SIDEKEM berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan penyediaan pemeliharaan perangkat pendukung SIDEKEM salah satunya yaitu desa pengadaan admin sebagai pengelola. Berdasarkan 211 Desa yang ada di Kabupaten Pematang belum seluruhnya

mempunyai SDM sebagai operator desa yang memiliki kemampuan dalam mengelola SIDEKEM. Hal ini menyebabkan terhambatnya implementasi SIDEKEM di Kabupaten Pemalang. Berdasarkan data yang diperoleh, masih terdapat perangkat desa yang belum menginput data dan memanfaatkannya dengan maksimal. Dapat dilihat dari 211 Desa hanya beberapa perangkat desa saja yang telah menginput data di SIDEKEM, yaitu sebagai berikut:

Gambar 1.1

Data Perangkat Desa yang Mengisi SIDEKEM Tahun 2022



Sumber : puspindes.pemalangkab.go.id

Gambar 1.1 menerangkan dari jumlah 211 Desa di Kabupaten Pemalang mayoritas yang mengisi data di akun SIDEKEM masih belum tercapai 100% dari target yang telah ditetapkan. Keterbatasan sumber daya ahli terutama di tingkat desa

di Kabupaten Pematang Jaya menjadi salah kendala dalam implementasi SIDEKEM walaupun sudah dilakukan sosialisasi dan pelatihan oleh PUSPINDES. Hal tersebut mengakibatkan belum publikasi informasi desa dan data Perangkat Desa di website SIDEKEM. Selain itu, terdapat kendala di berbagai wilayah desa yang masih belum terdapat jaringan internet yang memadai dan juga desa yang sudah menerapkan SID melalui SIDEKEM pun ada yang memutuskan untuk melaksanakan SID secara manual karena adanya keterbatasan jaringan internet untuk mengoperasikannya.

Pengamatan yang dilakukan oleh penulis dengan melihat beberapa website desa tersebut menunjukkan bahwa website desa yang idealnya menampilkan tentang informasi dasar mengenai desa seperti profil desa, data pemerintahan desa, data kependudukan, data monografi, berita desa, peta desa, transparansi anggaran desa, dan potensi desa, dan sebagainya. Namun demikian belum semua Desa menampilkan informasi tersebut secara lengkap sesuai berdasarkan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan, selain itu tingkat update atau keterbaruan informasi juga masih kurang dan belum dilakukan secara konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi program SIDEKEM di Kabupaten Pematang Jaya belum optimal. Belum terlihat keberhasilan penyampaian informasi publik melalui pemanfaatan teknologi informasi. Penulis ingin mengetahui apakah faktor-faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan implementasi SID melalui SIDEKEM di Kabupaten Pematang Jaya.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Persentase yang mengakses website SIDEKEM di Kabupaten Pematang Jaya.

2. Rendahnya kemampuan sumber daya manusia Pemerintah Desa dalam menggunakan teknologi informasi untuk mengakses SIDEKEM.
3. Belum meratanya fasilitas jangkauan internet di setiap desa di Kabupaten Pematang.
4. Rendahnya komitmen Perangkat Desa dalam menginput data untuk keterbukaan informasi melalui SIDEKEM.

1.3 Rumusan Masalah

Apakah faktor-faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan implementasi program SIDEKEM di Kabupaten Pematang?

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan implementasi program SIDEKEM di Kabupaten Pematang.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian merupakan hasil pencapaian dari sebuah tujuan. Melalui uraian serta pembahasan yang ada dalam penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk berbagai pihak, antara lain:

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu administrasi publik terutama berkaitan dengan studi kebijakan publik serta dapat dijadikan sebagai referensi atau acuan untuk melaksanakan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan topik dalam penelitian ini.

1.5.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, meningkatkan wawasan dan pengalaman untuk peneliti sendiri. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan materi dan acuan dalam ilmu metode penelitian dan dapat dijadikan sebagai pembanding untuk bahan penelitian selanjutnya.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan implementasi SID melalui program SIDEKEM di Kabupaten Pemalang.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini berguna untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan implementasi program SIDEKEM di Kabupaten Pemalang yang selanjutnya supaya dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk optimalisasi implementasi program SIDEKEM di Kabupaten Pemalang.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 2

Penelitian Terdahulu

| No. | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Metode Penelitian | Hasil Penelitian | Perbedaan Penelitian |
|------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Nian Riawati (2018) | <i>Village Innovation Through</i> | Pendekatan kualitatif, penelitian ini | Sistem Administrasi Informasi Desa | Penelitian terdahulu berfokus |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|---------------------|--|---|--|---|
| | | <i>Village Information Administration System (SAID) in Bondowoso District East Java Province</i> | dapat menggambarkan konteks dan setting secara alami melalui observasi, wawancara. | (SAID) mampu mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah desa namun dalam implementasinya terdapat beberapa permasalahan seperti masalah jaringan internet, rendahnya kompetensi sumber daya manusia, kurangnya dukungan dari pemerintah desa dan sarana dan prasarana yang kurang memadai. | terhadap implementasi SID dan faktor keberhasilan implementasi SID, sedangkan penulis berfokus terhadap faktor-faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan implementasi SID di Kabupaten Pematang. |
| 2. | Abdul Shomad (2018) | Implementasi Sistem Informasi Desa di Kabupaten Bekasi | <i>Mix methods</i> /gabungan metode kuantitatif dan kualitatif dengan perolehan data melalui survei dan wawancara mendalam. | Masih ada desa yang tidak memiliki data desa dan tidak memberi akses kepada masyarakat untuk melihat anggaran, program kerja, dan kebijakan desa lainnya. | Penelitian terdahulu berfokus terhadap bagaimana implementasinya, sedangkan penulis akan meneliti dengan berfokus terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan penerapan SID melalui SIDEKEM. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|-------------------|--|---|--|---|
| 3. | Umi Arifah (2018) | Implementasi Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kebumen dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Desa yang Baik | Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. | Hasil Penelitian menunjukkan Sistem Informasi Desa (SID) di Kabupaten Kebumen belum Hasil Penelitian menunjukkan Sistem Informasi Desa (SID) di Kabupaten Kebumen belum berjalan secara maksimal. Komunikasi dan koordinasi antar pihak yang berwenang belum berjalan maksimal. Sumber daya pengelola SID perlu penguatan dan pendampingan secara konsisten dari Pemerintah Daerah. Masih muncul ego sektoral dari Pemerintah Desa maupun masing-masing OPD yang bertanggungjawab sehingga dalam implementasinya dianggap belum menjadi kebutuhan untuk Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah. | Penelitian terdahulu berfokus terhadap Sistem Informasi Desa yang diselenggarakan secara luring sedangkan penulis akan meneliti dengan berfokus terhadap faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketidakberhasilan penerapan SID secara online melalui SIDEKEM. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|---|---|--|---|--|
| 4. | Siti ANISAH (2019) | Implementasi Program Sistem Informasi Desa (SID) di Kecamatan Singingi Kabupaten Singingi. | Metode Kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi SID di Desa Singingi belum optimal karena terdapat beberapa faktor penghambat seperti, sumber daya manusia, kebijakan, komunikasi, dan penguatan aktivitas, kondisi ekonomi, dan kongsi /pemahaman implementator. | Dalam penelitian terdahulu, peneliti menggunakan teori van Mater dan Van Horn untuk melihat bagaimana jalannya implementasi kebijakan SID di Kecamatan Singingi, sedangkan penulis menggunakan teori G. Edward untuk menganalisis faktor-faktor ketidakberhasilan implementasi SIDEKEM di Kabupaten Pematang |
| 5. | Sendy Noviko, dan Sigit Eko Prasetyo (2019) | Implementasi Sistem Informasi Desa dan Kawasan (Sideka) Di Kawasan Desa-Desa Pariwisata di Banyumas | Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan jenis data kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama ini aplikasi SIDEKA kurang berjalan baik bahkan ada yang tidak berjalansama sekali karena berbagai kendala. Diperlukan penguatan bagi pemerintah desa khususnya bagi perangkat desa dan | Penelitian terdahulu berfokus terhadap implementasi SID salah satu desa, sedangkan penulis akan berfokus terhadap faktor-faktor apa saja yang akan mempengaruhi ketidakberhasilan |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|---|--|-----------------------|--|---|
| | | | | kelembagaan masyarakat desa serta penguatan pengetahuan bagi masyarakat desa secara luas. | penerapa SID melalui SIDEKEM. |
| 6. | Asep Nurdin Rosihan dan Li Sujai (2020) | Analisis Implementasi Sistem Informasi Desa Trintegrasi di Kabupaten Pangandaran | Deskriptif kualitatif | Hasil penelitian menunjukkan dari data sistem informasi desa yang telah dihimpun, yakni terdapat 42 (empat puluh dua) desa yang telah mempunyai sistem informasi desa dari 93 (sembilan puluh empat) desa yang ada di Kabupaten Pangandaran. Artinya hanya 44,68% (persen) desa yang telah mempunyai sistem informasi desa yang terintegrasi. Sistem informasi desa yang dimiliki desa-desa tersebut terdiri dari website pemerintahan desa dengan domain .id ataupun adapula yang hanya masih berupa web-blog. Sehingga dapat dikatakan implementasi sistem informasi | Penelitian terdahulu berfokus terhadap bagaimana implementasi nya, sedangkan penulis akan meneliti dengan berfokus terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan penerapa SID melalui SIDEKEM. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|--|---|--|---|---|
| | | | | desa di Kabupaten Pangandaran belum optimal. | |
| 7. | Diana Hertati (2020) | Model Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Berbasis Website Bagi Pemerintah Desa di Kabupaten Sidoarjo | Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan <i>interview</i> , <i>focused group</i> dan <i>discussion</i> . | Penelitian ini menemukan bahwa Desa segoro Tambak belum mewujudkan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel dibandingkan desa Tambak Oso serta belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan. Beberapa kendala yang dihadapi desa Segoro Tambak, di antaranya belum efektifnya pembinaan terhadap aparatur desa, Aplikasi siskeudes ini juga dibangun dengan built-in internal control sehingga kesalahan-kesalahan yang terjadi juga dapat diminimalisir. | Penelitian terdahulu hanya meneliti bagaimana pelaksanaan SID di beberapa desa sedangkan penulis akan meneliti dengan berfokus terhadap faktor-faktor apa saja yang akan mempengaruhi ketidakterbacaan penerapan SID melalui SIDEKEM. |
| 8. | Indra Taufiqurrahman, dan Irfan Nursetiawan (2021) | <i>Optimization of Village Information System in Village Information Disclosure in Masawah</i> | Metode deskriptif kualitatif. | Optimalisasi Sistem Informasi Desa dalam Keterbukaan Informasi Publik di Desa Masawah, | Penelitian terdahulu berfokus terhadap optimalisasi SID di Kabupaten Pangandaran, |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|---------------------|--|---|--|---|
| | | <i>Village Cimerak District, Pangandaran Regerency</i> | | Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran masih belum berjalan optimal, hal ini dikarenakan masih banyak kendala yang dialami oleh pemerintah Desa Masawah, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran di optimalisasi Sistem Informasi Desa, seperti Sumber Daya Manusia, Kesiapan Infrastruktur, dan Teknologi di Desa Masawah, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran. | sedangkan penulis berfokus terhadap faktor-faktor ketidakberhasilan implementasi SID melalui SIDEKEM di Kabupaten Pematang. |
| 9. | Deny Iswanto (2021) | <i>Smart Village Governance through the Village Information System in Tuban Regerency.</i> | Analisis deskriptif metode penelitian dan dikombinasikan dengan analisis SWOT metode. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi dari konsep desa cerdas di Kabupaten Tuban belum memiliki model pengembangan yang dirancang sebelumnya. Itu implementasi desa pintar hanya terfokus pada pengembangan pelayanan administrasi | Penelitian terdahulu berfokus terhadap implementasi Smart Village yang hanya berfokus terhadap pelayanan administrasi, sedangkan penulis berfokus meneliti faktor-faktor yang |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|------------------------------------|--|--|--|--|
| | | | | berupa penggunaan teknologi informasi yang hanya salah satu indikatornya pelaksanaan desa pintar, tapi untuk yang lain unsur indikator masih jauh dari konsep umum bagaimana implementasi desa pintar sebenarnya. | menyebabkan ketidakberhasilan implementasi SID di Kabupaten Pematang. |
| 10. | Novi Tyas egasari (2021) | Implementasi Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pengelolaan Sistem Informasi Desa di Desa Bangunmulyo Kecamatan Pekel Kabupaten Tulungagung) | Metode Kualitatif | Hasil penelitian tersebut adalah Pemerintah Desa Bangunmulyo masih kekurangan sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem informasi desa (SID) berbasis web atau online dikarenakan belum ada operator desa yang khusus untuk mengoperasikan sistem informasi desa (SID) berbasis web. | Penelitian terdahulu hanya meneliti bagaimana pelaksanaan SID di desa Bangunmulyo, sedangkan penulis akan meneliti dengan berfokus terhadap faktor-faktor yang menyebabkan ketiakberhasilan penerapan SID melalui SIDEKEM. |
| 11. | Ega Megawati dan Kiki Endah (2021) | <i>Management Of Website-Based Village Information System By Village Government Partners In Pangandara</i> | Kualitatif deskriptif dengan melakukan observasi dan wawancara | Berdasarkan transformasi informasi, implementasi dalam hal pengumpulan data dan informasi masih kurang, dari komunikasi | Penelitian terdahulu berfokus terhadap bagaimana implementasi SID di Pemerintahan Desa Pangandaran |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|----------------------|---|--|---|--|
| | | <i>n Village Pangandaran District Pangandaran Regeency</i> | | informasi dalam hal sosialisasi pelaksanaan, pengarahannya, petunjuk pelaksanaan juga kurang, demikian juga dari segi pembinaan masih kurang. | sedangkan penulis berfokus untuk meneliti faktor-faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan SID melalui SIDEKEM di Kabupaten Pematang. |
| 12. | Rivaldo Yetta (2022) | Implementasi Kebijakan Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah | Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif. | Hasil dari penelitian tersebut adalah implementasi kebijakan pengembangan SID di Kabupaten Banggai belum dapat berjalan dengan maksimal yang disebabkan beberapa hal yang menjadi faktor penghambat seperti, kurangnya kesadaran dari pemerintah desa pentingnya pengembangan SID, kurangnya pengawasan serta pelatihan pelaksanaan kebijakan, kurangnya SDM, kurangnya layanan jaringan /internet, kurangnya | Dalam penelitian terdahulu, peneliti menggunakan teori van Mater dan Van Horn untuk melihat bagaimana jalannya implementasi kebijakan SID di Kabupaten Banggai, sedangkan penulis menggunakan teori G. Edward untuk menganalisis faktor-faktor ketidakberhasilan implementasi SIDEKEM di Kabupaten Pematang. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|--|--|---|---|--|
| | | | | anggaran, koordinasi antara instansi terkait belum berjalan dengan baik. | |
| 13. | Ajeng Desmaya nty, Ayu Hayuning , Diki Taufik, Lia Astritama ra, Novia avenia (2022) | Implementasi Sistem Informasi Desa Berbasis Website di Desa Sindangsari. | Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif | Berdasarkan hasil dari data yang dihimpun dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Desa Sindangsari dalam implementasi Sistem Informasi Desa berbasis website dapat dikatakan belum optimal. | Penelitian terdahulu berfokus terhadap implementasi SID di Pemerintahan Desa Sindangsar, sedangkan penulis berfokus untuk meneliti faktor-faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan SID melalui SIDEKEM di Kabupaten Pematang. |
| 14. | Refita Fathrani, Rifan Dwiyan, M Revansyah (2022) | Implementasi Sistem Informasi Desa Berbasis Website di Desa Giriharja Kecamatan Rancah | Metode Deskriptif Kualitatif | Hasil penelitian tersebut adalah dalam implementasi SID berbasis website di Desa Giriharja terdapat hambatan seperti, kurangnya sarana prasarana, kurangnya akses jaringan internet, kurangnya pengelolaan informasi yang | Pada penelitian terdahulu dalam menganalisis implementasi SID di Desa Giriharja menggunakan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara, sedangkan peneliti menganalisis faktor-faktor |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|---|--|-----------------------|--|---|
| | | | | dilakukan oleh Perangkat Desa. | ketidakberhasilan implementasi dengan teknik wawancara dan dokumentasi. |
| 15. | Xiayun Li, Liyun Wang, dan Liuyeu Fang (2022) | <i>Optimal Design of an Information Management Systems for Fovernment : Abridge between Government and Citizens.</i> | Deskriptif Kualitatif | Implementasi Sistem Informasi Management berhasil menyelesaikan operasi fungsional terkait, yang berguna untuk mempromosikan pembentukan partisipatif sistem pemerintahan di Cina. | Penelitian terdahulu berfokus terhadap keberhasilan implementasi SIM di China, sedangkan penulis berfokus meneliti faktor-faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan implementasi SID melalui SIDEKEM di Kabupaten Pematang. |

Penelitian terdahulu ini merupakan upaya yang dilaksanakan oleh peneliti untuk membandingkan dan untuk menemukan gagasan baru untuk penelitian selanjutnya. Penelitian terdahulu digunakan sebagai tolak ukur peneliti untuk menganalisis dan menguraikan apa saja faktor-faktor ketidakberhasilan dalam implementasi SID melalui program SIDEKEM di Kabupaten Pematang, serta untuk mengetahui bagaimana langkah penulis penelitian yang benar.

Jurnal dari Umi Afifah (2019) yang berjudul “Implementasi Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kebumen dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Desa yang Baik. Penelitian tersebut membahas mengenai implementasi SID di Kabupaten Kebumen dimana dalam pelaksanaannya terdapat faktor pendukung yaitu terdapat pembagian tugas yang jelas pada pihak yang berkaitan, selain itu juga terdapat faktor yang menghambat implementasi yaitu tidak ada pendampingan dan monitoring yang kurang berjalan dengan baik dalam implementasi SID, dan pemanfaatan teknologi yang masih rendah. Dalam penelitian tersebut terdapat faktor keberhasilan yang menjadi pembeda dengan penelitian penulis dimana penelitian ini hanya berfokus terhadap faktor ketidakberhasilan implementasi SID melalui SIDEKEM. Adapun manfaat dari penelitian terdahulu tersebut dapat menjadi acuan penulis untuk menganalisis faktor-faktor ketidakberhasilan SID melalui SIDEKEM di Kabupaten Pemalang dengan melihat kendala belum optimalnya implementasi SIDEKA di Kabupaten Banyumas.

Jurnal dari Diana Hertati (2020) yang berjudul “Model Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Berbasis Web bagi Pemerintah Desa di Kabupaten Sidoarjo” menggunakan metode kualitatif dengan wawancara dan dokumentasi pada desa Tambak Oso Kecamatan Waru dan Desa Sedati Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Dalam penelitian tersebut, pada implementasi SID melalui website terdapat beberapa kendala yang dihadapi, diantaranya pembinaan kepada aparatur desa belum berjalan dengan efektif, kesalahan-kesalahan dalam aplikasi Siskeudes dapat diminimalisir karena dibangun dengan *built in internal*. Adapun manfaat berdasarkan penelitian terdahulu tersebut dapat menjadi acuan penulis

untuk menganalisis faktor-faktor ketidakberhasilan SID melalui SIDEKEM di Kabupaten Pematang Jaya.

Jurnal dari Asep Nurdin dan Li Sujai (2020) yang berjudul “Analisis Implementasi Sistem Informasi Desa Terintegrasi di Kabupaten Pangandaran” menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian terdahulu tersebut membahas implementasi SID di Kabupaten Pangandaran yang belum optimal. Adapun faktor-faktor yang mengakibatkan belum terlaksananya SID dengan optimal meliputi penerapan SID, yaitu Sumber Daya Manusia, infrastruktur, serta kesiapan teknologi. Sumber daya manusia dalam hal ini tertuju pada kurangnya operator komputer di Pemerintahan Desa. Pada penelitian tersebut terdapat faktor penghambat implementasi SID di Kabupaten Pangandaran sehingga dapat dimanfaatkan penulis sebagai acuan untuk meneliti faktor-faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan SID melalui SIDEKEM di Kabupaten Pematang Jaya.

1.6.2 Administrasi Publik

Konsep administrasi publik di Indonesia merupakan bukan konsep baru, melainkan konsep lama yang diperbaharui oleh para ahli dari administrasi negara menjadi administrasi publik. Chandler dan Plano dalam Pasolong (2016:7) mengemukakan bahwa:

“Administrasi Publik merupakan seni dan ilmu (*art and science*) yang ditujukan untuk mengatur “*public affairs*” dan melaksanakan berbagai tugas yang ditentukan. Administrasi Publik sebagai disiplin ilmu bertujuan untuk memecahkan masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama dibidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan.”

Menurut Felix A. Nigro dan Lloyd G. Nigro dalam Sodikin (2015:5) mengemukakan lima definisi mengenai pengertian Administrasi Publik, antara lain:

1. Administrasi Publik adalah suatu kerja sama antar pihak terkait dalam lingkungan pemerintahan;
2. Administrasi Publik mencakup tiga bagian pemerintahan yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta keterkaitannya;
3. Administrasi Publik mempunyai peran penting dalam perumusan kebijakan Negara, dan karenanya administrasi publik merupakan bagian dari proses politik;
4. Administrasi Publik sangat erat terkait dengan berbagai macam kelompok swasta dan individu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat);
5. Administrasi Publik berbeda secara signifikan dari administrasi privat.

Administrasi publik menurut Henry (dalam Deddy, 2016;34) adalah suatu gabungan yang kompleks antara teori dan praktik yang bertujuan untuk mempromosikan pemahaman tentang pemerintahan dalam kaitannya dengan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan publik untuk lebih merespon kebutuhan sosial. Menurut Chandler dan Plano en Keban (dalam Deddy, 2016; 34), administrasi publik adalah proses pengorganisasian dan koordinasi sumber daya dan pemerintah publik untuk perumusan, pelaksanaan, dan pengelolaan (administrasi) keputusan kebijakan publik.

Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli tersebut maka dapat disimpulkan administrasi publik merupakan suatu kerjasama yang dilaksanakan oleh sekelompok orang maupun lembaga terkait dalam melaksanakan kegiatan yang terdiri dari teori dan praktik pelaksanaan pemerintahan guna mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan negara seperti pelayanan publik secara efektif dan efisien.

1.6.3 Kebijakan Publik

Menurut Chandler dan Plano dalam (Harbani Pasolong 2014:38), kebijakan publik adalah pemanfaatan strategis sumber daya yang tersedia untuk mengatasi permasalahan publik maupun pemerintahan.

Nugroho, (2016:125) mengemukakan bahwa:

Kebijakan publik itu adalah “*a relative stable, purposive course of action 9 followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” suatu langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.

Kemudian Mulyadi (2015:37), menyatakan bahwa:

Kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi kesalahan tertentu melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang mempunyai wewenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan, berlangsung dalam satu kebijakan tertentu.

Starling dalam (Arifin Tahir 2014:28), menjelaskan adanya lima tahap proses terjadinya kebijakan publik yakni:

1. Identifikasi kebutuhan yaitu menganalisa kebutuhan masyarakat dalam pembangunan dengan memperhatikan beberapa kriteria seperti analisis data, statistik data, dan sebagainya.
2. Formulasi kebijakan usaha yang meliputi faktor-faktor strategis, alternatif-alternatif umum, kestabilan teknologi, dan analisis dampak lingkungan.
3. Adopsi yang mencakup analisis kelayakan politik, gabungan beberapa teori politik, dan penggunaan teknik.

4. Pelaksanaan program yang meliputi bentuk organisasi, mode penjadwalan, penjabaran keputusan, penetapan harga, dan skenario pelaksanaannya.
5. Evaluasi yang mencakup penggunaan metode eksperimental, sistem informasi, audit, dan evaluasi.

1.6.4 Implementasi Kebijakan

Winarno, (2016:102) menyatakan bahwa: Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan

Menurut Hamdi (2014:97), implementasi kebijakan berhubungan dengan upaya-upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dari suatu kebijakan tertentu.

Kemudian menurut Wibawa (Tahir, 2014:58), tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Keseluruhan proses penetapan kebijakan baru bisa dimulai apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah rinci, program telah dirancang dan juga sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut.

Widodo (Pratama, 2013:230) menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan publik merupakan tahap penting dalam proses kebijakan publik (*public policy process*) dan merupakan studi yang sangat penting. Hal ini penting karena meskipun kebijakan tersebut sudah tepat, tetapi jika tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik dalam pelaksanaannya, maka tujuan kebijakan tersebut tidak akan tercapai. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah proses pelaksanaan kebijakan yang melibatkan tiga

hal penting, yaitu tujuan dan sasaran, aktivitas untuk mencapai tujuan kebijakan, dan hasil dari kebijakan tersebut.

Matland (Hamdi, 2014:98) menyatakan bahwa literatur mengenai pelaksanaan kebijakan secara umum dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok dengan pendekatan dari atas (*top-down*) dan kelompok dengan pendekatan dari bawah (*bottom-up*). Model dengan pendekatan *top-down* melihat perancang kebijakan sebagai aktor sentral dalam pelaksanaan kebijakan. Model *top-down* juga memfokuskan perhatiannya pada faktor-faktor yang dapat dimanipulasi pada tingkat sentral atau pada variabel yang bersifat makro. Model *bottom-up* memfokuskan perhatiannya pada variabel yang bersifat mikro. Kemudian muncul kelompok ketiga, yang mencoba menyatukan kedua kelompok tersebut dengan fokus pada aspek ambigu dan konflik dari pelaksanaan kebijakan. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kebijakan, diperlukan proses penilaian secara berkala terhadap implementasi kebijakan yang mendukung kesuksesan pelaksanaannya. Proses penilaian dilakukan dengan membandingkan implementasi kebijakan terhadap 23 standar yang telah ditetapkan.

1.6.5 Faktor-Faktor Implementasi Kebijakan

Model Implementasi kebijakan publik menurut George C. Edwards III dalam Agustino (2016) diidentifikasi terdapat empat faktor utama yang menentukan implementasi kebijakan dalam kebijakan publik yaitu:

a. Faktor Komunikasi

Komunikasi kebijakan merupakan suatu proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan publik kepada para pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan memahami kebijakan dengan baik sehingga dalam pelaksanaannya dapat mencapai tujuan dan sasaran kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan.

Menurut Edward III dalam Agustino (2014: 150- 151) menjelaskan terdapat tiga indikator untuk mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut yaitu:

1) Transmisi.

Transmisi merupakan penyampaian komunikasi yang baik agar mendapatkan hasil implementasi yang baik pula. Terdapat masalah yang kerap terjadi dalam penyampaian komunikasi yaitu adanya *misskomunikasi*.

2) Kejelasan.

Kejelasan dalam komunikasi adalah penyampaian komunikasi yang disampaikan oleh pembuat kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan (tidak multitafsir).

3) Konsistensi.

Konsistensi dalam berkomunikasi merujuk komunikasi dalam memberikan instruksi pada pelaksanaan suatu komunikasi harus selalu konsisten dan jelas agar dapat ditetapkan atau dijalankan dengan baik. Apabila instruksi yang disampaikan berubah-ubah, maka dapat menyebabkan kebingungan bagi implementator.

b. Sumber Daya

Pelaksanaan kebijakan hanya dapat terjadi jika tersedia sumber daya yang cukup untuk mendukung implementasi. Sumber daya yang dibutuhkan termasuk tenaga kerja dan keuangan. Implementasi kebijakan hanya dapat berhasil jika sumber daya yang diperlukan tersedia untuk mendukung seluruh aktivitas yang terlibat. Menurut G. Edward III seperti yang dikutip oleh Tahir (2014:66), "sumber daya memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan, termasuk sumber daya manusia, sumber daya keuangan, peralatan, dan wewenang."

1) Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

2) Sumber Daya Anggaran

Edward III dalam Tahir (2014:66) menyampaikan bahwa keterbatasan anggaran dalam implementasi kebijakan akan berdampak pada keberhasilan implementasi dan dapat mengakibatkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

3) Sumber Daya Peralatan (Fasilitas)

Menurut Tahir (2014:66), Edward III memaparkan bahwa fasilitas merujuk pada segala bentuk alat yang digunakan untuk mewujudkan suatu kebijakan, seperti gedung, tanah, perangkat, dan infrastruktur. Semua ini akan mempermudah proses pelayanan dalam pelaksanaan kebijakan.

4) Sumber Daya Kewenangan

Sumber daya lain yang sangat berperan dalam menentukan kesuksesan suatu implementasi kebijakan adalah wewenang. Menurut Edward III dalam Tahir

(2014:67), wewenang yang memadai untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan berdampak pada kemampuan lembaga tersebut dalam melaksanakan suatu kebijakan. Wewenang menjadi sangat penting ketika lembaga tersebut menghadapi suatu masalah yang memerlukan keputusan segera.

c. Disposisi

Sikap atau disposisi dari pelaksana kebijakan juga menjadi faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan. Untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang efektif, pelaksana kebijakan harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan kebijakan (Kania et al., n.d.). Disposisi juga mencakup karakter dan sikap yang ditunjukkan oleh pelaksana kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, dan demokratis (Putra & Khaidir, 2019).

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik. Jika struktur birokrasi lemah maka pelaksana kebijakan tidak dapat melaksanakan kebijakan dengan tepat meskipun sumber daya tersedia, tugas dan mereka memiliki kesadaran dan keinginan untuk melaksanakan kebijakan. Struktur birokrasi yang tidak kondusif dapat menghambat kebijakan dan mengurangi efektivitas sumber daya karena kebijakan memerlukan kerjasama banyak pihak. Oleh karena itu, koordinasi yang baik harus dilakukan oleh birokrasi untuk melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan secara politik.

Van Meter dan Van Horn (Tahir, 2014:71-72) mengemukakan sebuah ringkasan yang menunjukkan keterkaitan antara berbagai faktor yang

mempengaruhi efektivitas suatu kebijakan. Terdapat enam faktor yang berperan dalam mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan atau ukuran dan tujuan kebijakan

Meter dan Van Horn menyatakan bahwa evaluasi kinerja implementasi kebijakan dapat dilakukan dengan menggunakan standar dan target sasaran tertentu yang harus dipenuhi oleh pelaksana kebijakan. Penilaian kinerja kebijakan didasarkan pada sejauh mana standar dan target sasaran tersebut tercapai. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang standar dan target sasaran kebijakan sangatlah penting.

2. Sumber daya

Dalam tahap implementasi memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan sesuai dengan tugas yang diberikan oleh kebijakan politik yang telah ditetapkan. Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan penerapan kebijakan, karena keberhasilan tersebut sangat bergantung pada kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia, terutama sumber daya manusia. Selain sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan waktu juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan penerapan kebijakan. Sumber daya kebijakan tidak kalah pentingnya dengan komunikasi.

3. Karakteristik organisasi pelaksana

Fokus pihak pelaksana adalah organisasi formal dan organisasi informal yang berkaitan dalam implementasi kebijakan. Hal ini penting karena efektivitas implementasi kebijakan sangat bergantung pada karakteristik yang sesuai dengan agen pelaksana. Ini terkait dengan situasi di mana beberapa kebijakan memerlukan

pelaksana yang disiplin dan tegas, sedangkan di situasi lain, diperlukan agen yang demokratis dan persuasif.

4. Komunikasi antar organisasi terkait dan suatu kegiatan pelaksanaan

Untuk menjalankan kebijakan publik dengan efektif, menurut Van Meter dan Van Horn pihak yang melaksanakan kebijakan harus memahami standar tujuan yang harus dicapai. Komunikasi yang jelas dan konsisten harus dilakukan dalam rangka memberikan informasi kepada pelaksana kebijakan tentang standar dan tujuan yang harus dicapai. Konsistensi dan keseragaman informasi juga harus dijaga dari berbagai sumber informasi.

5. Disposisi atau sikap para pelaksana

Menurut pandangan Van Meter dan Van Horn: Sikap yang diambil oleh pelaksana kebijakan dalam menerima atau menolak akan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang akan dijalankan bukanlah hasil dari formulasi masyarakat setempat yang akan memahami dengan baik masalah dan tantangan yang mereka hadapi. Kebijakan publik biasanya bersifat *top-down*, yang sangat mungkin untuk pengambil keputusan tidak memiliki pengetahuan atau bahkan tidak mampu memahami kebutuhan, keinginan, atau masalah yang harus dipecahkan.

6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Aspek terakhir yang perlu dipertimbangkan untuk mengevaluasi kinerja implementasi kebijakan yaitu sejauh mana lingkungan luar mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang tidak

mendukung dapat menyebabkan masalah dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan memerlukan lingkungan luar yang mendukung.

1.6.7 Sistem Informasi Desa

Wilhem Wau (dalam Sulistyowati, Fadjarini dan Dibyorin Mc. Canra R, 2013) menjelaskan bahwa Sistem Informasi Desa (SID) merupakan informasi yang dioperasikan melalui perangkat teknologi informasi dan aplikasi perangkat lunak oleh perangkat desa. Teknologi komputer dan situs web digunakan untuk menciptakan sistem informasi ini agar informasi dapat diakses oleh masyarakat. SID dilisensikan dalam platform perangkat lunak bebas dan terbuka yang memungkinkan penggunaannya, penyajiannya, penyebarannya, peningkatan kinerjanya, dan modifikasinya disesuaikan dengan kebutuhan. Dengan itu, SID didesain untuk memberikan informasi dan membantu pelayanan publik.

Menurut Hidayatulloh, Syarif, dan Mulyadi (2015), pelayanan administrasi kependudukan online atau *e-service* adalah suatu inovasi yang meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa dan memaksimalkan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan pelayanan online, masyarakat dapat dilayani kapan saja dan di mana saja. Implementasi sistem informasi desa memudahkan masyarakat desa untuk mengaksesnya. Menurut Pascual (dalam Sutanta, Edhi, dan Ashari, Ahmad, 2012), *e-government* adalah penggunaan teknologi informasi (TI) untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan bisnis, serta mengkomputerisasi prosedur yang sebelumnya dilakukan secara manual. Hal ini mempengaruhi kepemimpinan, strategi, transaksi

bisnis, pendengaran warga dan komunitas, serta pengorganisasian dan penyampaian informasi.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep merupakan definisi berdasarkan sifat-sifat variabel yang diamati. Operasionalisasi konsep menjadi gejala-gejala sebagai konsep utama yang diamati dalam penelitian, yang disertai dengan operasionalisasi tolak ukur atas konsep tersebut. Dalam menganalisis implementasi SID melalui SIDEKEM di yang diatur dalam Peraturan Bupati No. 89 mengenai implemnetasi SIDEKEM di Kabupaten Pematang, peneliti menganalisis faktor-faktor penghambat implementasi program SIDEKEM di Kabupaten Pematang berdasarkan fenomena sebagai berikut:

1. Struktur Birokrasi

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis bagaimana kepatuhan terhadap ketentuan atau SOP dan fragmentasi dalam struktur birokrasi pada implementasi program SIDEKEM di Kabupaten Pematang.

2. Sumber Daya

Sumber daya dibagi menjadi empat yaitu sumber daya manusia dan sumber daya anggaran, fasilitas, dan kewenangan. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis bagaimana faktor sumber daya dalam pelaksanaan program SIDEKEM yang ditinjau berdasarkan fenomenal yaitu sumber daya manusia, sumber daya anggaran, fasilitas, dan kewenangan.

3. Komunikasi

Setiap kebijakan mampu dilakukan dengan baik dan benar apabila memiliki komunikasi yang efektif antara pihak yang melaksanakan kebijakan dengan kelompok sasarannya. Dalam penelitian ini, penulis akan melihat bagaimana faktor komunikasi dari semua pihak yang terlibat dalam implementasi program SIDEKEM yaitu DINPERMASDES, PUSPINDES, dan Desa.

4. Disposisi

Disposisi menunjukkan sikap para implementator seperti tanggung jawab, kredibilitas, demokratis, serta batas kemampuan para implementator paham atas kebijakan tersebut. Hal ini penulis meninjau berdasarkan atas kemampuan Perangkat dalam memahami kebijakan SIDEKEM dan seberapa besar komitmen yang ditunjukkan oleh pihak pelaksana program SIDEKEM yang merupakan tanggung jawabnya.

1.8 Argumentasi Penelitian

Argumentasi penelitian berisi mengenai penjelasan dari rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian sesuai dengan teori yang terdapat pada literatur dan dibuat berdasarkan kerangka pemikiran teoritis. Kaitannya dengan penelitian ini yaitu hasil analisis faktor-faktor ketidakberhasilan implementasi program SIDEKEM di Kabupaten Pematang Jaya belum tentu dapat mengatasi permasalahan yang ada, namun hasil dari penelitian ini dapat menjadi solusi untuk mengoptimalkan implementasi program SIDEKEM di Kabupaten Pematang Jaya.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan karya tulis dengan struktur khusus, sehingga harus dilakukan dengan perencanaan yang baik dengan membuat perencanaan desain penelitian agar dapat dilakukan dengan lebih akurat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian penelitian kualitatif agar peneliti dapat mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor ketidakberhasilan implementasi kebijakan SIDEKEM di Kabupaten Pemalang.

Metode analisis deskriptif kualitatif adalah metode yang dapat menggambarkan, meringkas, dan menganalisis data yang diperoleh berdasarkan hasil pengamatan serta wawancara terkait masalah penelitian di lapangan. Untuk itu, peneliti dapat menjelaskan gambaran umum pada penelitian yang terkait pada fenomena yang terjadi pada implementasi program SIDEKEM di Kabupaten Pemalang. Dalam penelitian ini peneliti menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan implementasi kebijakan SIDEKEM di Kabupaten Pemalang.

1.9.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan suatu tempat dimana peneliti menganalisis keadaan yang sebenarnya dari obyek yang akan diteliti untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan. Situs penelitian yang diambil oleh peneliti antara lain:

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DINPERMASDES) Kabupaten Pemalang yaitu instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk

memfasilitasi pelatihan program SIDEKEM dan mengembangkan program SIDEKEM di Kabupaten Pemalang.

2. Pusat Pengembangan Informatika dan Desa (PUSPINDES) Kabupaten Pemalang yang merupakan pengelola pusat website SIDEKEM di Kabupaten Pemalang.
3. Desa Sikasur merupakan salah satu desa di Kabupaten Pemalang yang belum maksimal dalam mengimplementasikan program SIDEKEM sesuai dengan Peraturan Bupati yang telah ditetapkan.
4. Desa Randudongkal merupakan salah satu desa di Kabupaten Pemalang yang belum maksimal dalam mengimplementasikan program SIDEKEM sesuai dengan Peraturan Bupati yang telah ditetapkan.

1.9.3 Subjek Penelitian

Untuk memperoleh data yang relevan maka perlu ditetapkan informan yang berkompeten dan sesuai dengan kebutuhan data. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menentukan subjek penelitian. Teknik *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel data dengan mempertimbangkan dan menetapkan standar dan kriteria yang sesuai dengan penelitian tersebut.

Subjek dalam penelitian ini yaitu pihak-pihak yang berkaitan dalam implementasi SIDEKEM di Kabupaten Pemalang. Pemilihan subjek penelitian tersebut guna memperoleh data dan informasi tentang faktor-faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan implementasi SIDEKEM. Untuk mendapatkan data kualitatif, peneliti menggunakan tiga informan kunci sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DINPERMASDES) Kabupaten Pemalang. DINPERMASDES merupakan fasilitator pelatihan dan implementasi program SIDEKEM yang mengerti bagaimana pelaksanaannya sehingga dapat menunjang penelitian ini.
2. Ketua Pusat Pemberdayaan Informatika dan Desa (PUSPINDES) Kabupaten Pemalang. PUSPINDES merupakan pengelola website, perangkat SIDEKEM, dan pengelola SDM SIDEKEM di tingkat daerah dan desa sehingga mengerti implementasi program SIDEKEM di Kabupaten Pemalang.
3. Perangkat Desa Sikasur yang merupakan salah satu desa yang melaksanakan program SIDEKEM di Kabupaten Pemalang.
4. Perangkat Desa Randudongkal yang merupakan salah satu desa yang melaksanakan program SIDEKEM di Kabupaten Pemalang.

Dipilihnya informan kunci tersebut diharapkan dapat menunjang dan ampu mendukung kelengkapan pada penelitian ini.

1.9.5 Sumber Data

Terdapat dua jenis sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dengan langsung melalui wawancara informan atau dari sumber langsung. Informasi utama dari penelitian ini diperoleh dengan mewawancarai orang-orang yang terkait langsung dengan

PUSPINDES Kabupaten Pemalang tentang pelaksanaan program SIDEKEM di Kabupaten Pemalang.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang dipakai untuk menunjang data primer yaitu dengan studi pustaka, dokumentasi, buku, majalah, arsip yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti. Data sekunder yang peneliti dapatkan dalam penelitian ini seperti literatur, majalah, artikel, berita dari website terkait program SIDEKEM Kabupaten Pemalang.

1.9.4 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu data kualitatif dimana informasi yang dikumpulkan dalam bentuk kalimat, gambar, meupun tulisan. Penelitian ini memakai data kualitatif yang mana peneliti bertindak sebagai instrumen. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif yaitu kalimat atau teks tertulis untuk menganalisis implementasi kebijakan dan mendeskripsikan faktor keberhasilan dan hambatan implementasi kebijakan SIDEKEM di Kabupaten Pemalang.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah tahap penting yang harus diterapkan dalam penelitian. Dalam teknik pengumpulan data peneliti melakukan proses penelitian dengan menggunakan metode ilmiah dalam pengumpulan data secara terstruktur untuk dianalisis. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk pengumpulan data penelitian. Wawancara meliputi komunikasi dua arah guna mendapatkan informasi dari informan yang relevan dengan implementasi SIDEKEM. Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah teknik wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara bebas, dimana peneliti tidak mengacu pada pedoman wawancara yang terstruktur dan lengkap untuk mengumpulkan data. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur dengan petunjuk yang digunakan hanya berdasarkan poin-poin tertentu yang ditanyakan kepada informan terkait. Penelitian ini juga menggunakan pertanyaan terbuka untuk memperoleh tanggapan yang luas, karena penelitian ini membutuhkan tanggapan mendalam lebih dari satu kata.

2. Dokumentasi.

Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara agar lebih akurat dan kredibel bila apabila didukung oleh foto atau tulisan akademik yang ada. Tidak semua dokumentasi memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumen milik PUSPINDES, misalnya grafik persentase perangkat desa yang mengakses website SIDEKEM. Hasil penelitian dapat lebih akurat jika terdapat dokumentasi dalam penelitian.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data merupakan tahap pencarian maupun penyusunan data yang didapatkan berdasarkan hasil wawancara, data lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengintegrasikan data berdasarkan kategori-kategori, mendeskripsikannya

berdasarkan unit-unit, mensintesis, membandingkannya ke dalam pola-pola, memilih yang paling penting dan dipelajari untuk menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, penggunaan metode analisa data kualitatif bersifat bersifat interaktif dan berlanjut hingga akhir. Tahapan dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1.9.8 Kualitas Data

Penelitian menggunakan teknik triangulasi yang dilakukan dengan membandingkan berbagai sumber, tahapan, dan teori. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber agar memperoleh data dari sumber yang berbeda tetapi menggunakan teknik yang sama. Peneliti mengumpulkan berbagai sumber data dengan teknik yang sama dengan wawancara melalui informan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan implementasi program SID melalui SIDEKEM di Kabupaten Pematang.